



**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT COVID-19
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009**

TESIS

RIZKY YOSA ADHI PRABOWO

2010622013

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2022



**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT COVID-19
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**RIZKY YOSA ADHI PRABOWO
2010622013**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo

NIM : 2010622013

Tanggal : 13 Juli 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rizky Yosa Adhi Prabowo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo
NIM : 2010622013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENOLAKAN PASIE GAWAT DARURAT COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Tanggal 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



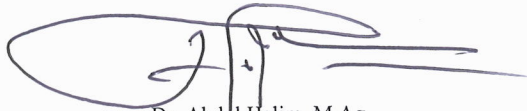
Rizky Yosa Adhi Prabowo

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

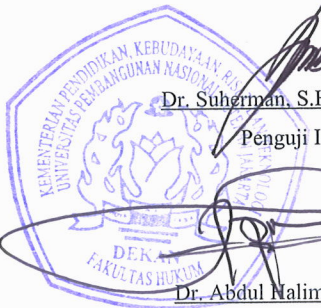
Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo
NIM : 2010622013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit atas Penolakan
Pasien Gawat Darurat COVID-19 Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



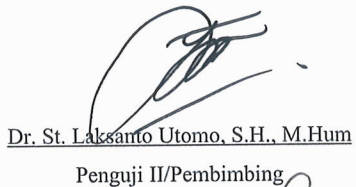
Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ketua Penguji



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Penguji I



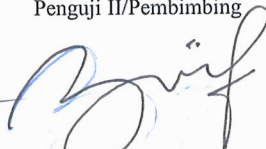
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum

Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Nalim, M.Ag

Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Juli 2022

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT COVID-19
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009**

RIZKY YOSA ADHI PRABOWO

Abstrak

Selama puncak gelombang kedua pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diketahui melalui beberapa media nasional kejadian pasien gawat darurat COVID-19 yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan, oleh karena itu dianggap perlu mengkaji mengenai tanggungjawab pidana rumah sakit atas penolakan pasien gawat darurat COVID-19. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berdasarkan sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif, sedangkan dari bentuknya termasuk penelitian preskriptif dan dari tujuannya termasuk penelitian *problem solution* dengan data yang dipergunakan yaitu data sekunder berdasarkan kepustakaan dan data lain yang telah tersedia. Kesimpulan tulisan ini adalah Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan pasien gawat darurat baik dalam kondisi bencana maupun tidak bencana serta sanksinya, dokter dan tenaga kesehatan memiliki hubungan hukum atasan dan bawahan dengan rumah sakit sehingga doktrin pertanggungjawaban hukum pengganti atau *vicarious liability* merupakan dasar pertanggungjawaban hukum rumah sakit, akan tetapi penerapan sanksi pidana sulit dilakukan karena terdapat sanksi administratif yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, walaupun jika dilihat peristiwa hukumnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana bunyi pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saran bagi pemerintah adalah sebaiknya mengatur tersendiri mengenai sanksi pidana bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menolak pasien gawat darurat dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bagi rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan harus menyadari bahwa pasien gawat darurat merupakan prioritas penanganan yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, dan bagi pasien untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai pasien khususnya dalam kondisi gawat darurat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Rumah Sakit, Pasien, Gawat Darurat

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo

NIM : 2010622013

Tanggal : 13 Juli 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rizky Yosa Adhi Prabowo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo
NIM : 2010622013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENOLAKAN PASIE GAWAT DARURAT COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Tanggal 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



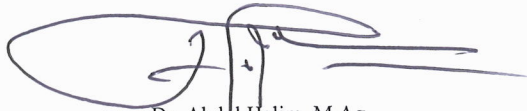
Rizky Yosa Adhi Prabowo

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

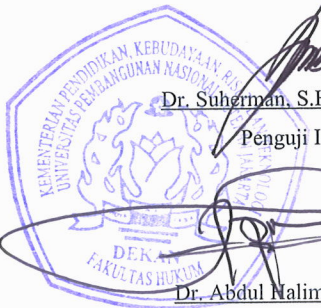
Nama : Rizky Yosa Adhi Prabowo
NIM : 2010622013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit atas Penolakan
Pasien Gawat Darurat COVID-19 Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



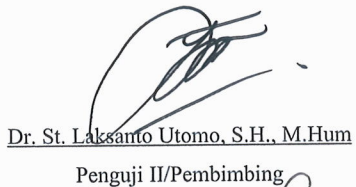
Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ketua Penguji



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Penguji I



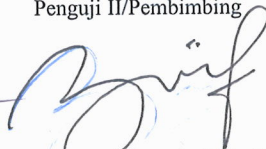
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum

Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Nalim, M.Ag

Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Juli 2022

**HOSPITAL CRIMINAL LIABILITY ON EMERGENCY
COVID-19 PATIENT REFUSAL IN TERM OF LAW
NUMBER 36 OF 2009**

RIZKY YOSA ADHI PRABOWO

Abstract

Based on numerous national news reports, many patients had been refused by hospitals for many reasons during the second wave CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic outbreak in Indonesia. Therefore, it needs to be studied on how hospitals took the criminal liability for emergency patient refusal during COVID-19 pandemic. This study uses normative law against legal principles in a descriptive method. This study also uses prescriptive and problem solution research by secondary datas based on literature and available datas. The conclusion of this study is that Indonesia has a clear law and regulations for emergency patients both in natural or non-natural disasters. This can be used by hospitals, physicians and also health workers as service and penalty guidance. Physicians and health workers have legal relationship in both emergency and non-emergency situation. They also have the same relationship in between superior and subordinate to hospital so the vecarious liability become the legal liability basis. However, the criminal sanction is quite difficult to apply because it must refer to administrative sanction before getting into criminal sanction, in accordance ultimum remedium in criminal law principle, even though the legal events fulfill the criminal element as written on article 190 Law Number 36 of 2009 about Health. Advice for the government, they may arrange the criminal sanction for healthcare refusing emergency patients as written on revision Law Number 4 of 1984 about Infectious Disease Outbreak. Hospitals, physicians, and health workers should be aware that the emergency patients are top handling priority and they can face administrative and criminal sanction if it is violated. Patients should also know their rights and obligations, particularly in emergency situations.

Keyword: Criminal Liability, Hospital, Patient, Emergency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak 4 Februari 2022 ini adalah Tanggung Jawab Hukum Pidana Rumah Sakit atas Penolakan Pasien Gawat Darurat COVID-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungan yang luar;
3. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan banyak masukan serta dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum, Pak Satino, Ibu Julian, Pak Rizki dan Pak Dwi serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan dukungan yang diberikan selama perkuliahan;
5. Organ tua yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat dalam perkuliahan dan penulisan tesis ini;
6. Faela Shafa istri terkasih, Mediana Adna Himalaya dan Shafiya Naima Alquds yang selalu memahami dan memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian studi;
7. Rekan-rekan di Kelas A Magister Hukum dan Kelas Hukum Kesehatan yang saling membantu dalam perkuliahan; dan
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, apabila terdapat saran dan masukan yang membangun dapat disampaikan kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta,

Penulis

Rizky Yosa Adhi Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
I.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
II.1 Kesehatan dan Rumah Sakit	18
II.2 Penanggulangan Bencana	25
II.3 Pelayanan Kegawatdaruratan.....	30
II.4 Penanggulangan Bencana Nonalam COVID-19 di Indonesia..	41
II.5 Teori Kepastian Hukum.....	55
II.6 Teori Tujuan Hukum.....	58
II.7 Teori Tanggung Jawab Hukum Pidana.....	60

BAB III	METODE PENELITIAN	66
	III.1 Metode Penelitian	66
	III.2 Pendekatan Penelitian.....	66
	III.3 Sifat Penelitian.....	67
	III.4 Sumber Bahan Hukum.....	67
	III.5 Analisis Data.....	68
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	69
	IV.1 Regulasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan Pasien Gawat Darurat COVID-19	69
	IV.2 Penolakan Pasien Gawat Darurat COVID-19	83
	IV.3 Tanggung Jawa Pidana Rumah Sakit Jika Menolak Pasien Gawat Darurat COVID-19.....	92
BAB V	PENUTUP	119
	V.1 Kesimpulan	119
	V.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		126
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Manajemen Bencana.....	27
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kualifikasi Tenaga Gawat Darurat	39
Tabel 2	Perbandingan Hukum Indonesia, Amerika dan India.....	110